

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN



**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN
LARANGAN
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2020**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tahun 2020.

Rencana Kerja ini di susun berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023.

Dalam laporan ini masih jauh dari kreterial sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya .

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Larangan Tahun 2020 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan .

Larangan, 30 Januari 2020

CAMAT LARANGAN

ACHMAD HAMBALI, S.Sos

Pembina
Nip. 1963

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1-3
1.2 DASAR HUKUM	3-7
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4 SISTIMATIKA PENULISAN	9
BAB II	
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENTRA PERANGKAT DAERAH	10-11
2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.	11
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.	12
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKKPERANGKAT DAERAH	12
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	13
BAB III	
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.	
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	14
3.2 TELAAHAN RENSTRA	14
3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	14
BAB IV	
PENUTUP	
A. CATATAN PENTING	45
B. KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN	45
C. RENCANA TINDAK LANJUT	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .

Rencana Kerja Tahun 2020 Perangkat Daerah Kecamatan Larangan yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan Larangan, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Perangkat Daerah Kecamatan Larangan dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Perangkat Daerah Kecamatan Larangan memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Larangan serta kerangka pendanaan daerah, Renja Perangkat Daerah Kecamatan Larangan

secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda Perangkat Daerah dan rencana resmi daerah (RKPerangkat Daerah, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .
3. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah .
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya .
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom – Up diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja(RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Larangan Tahun 2020 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, mengacu kepada Rancangan RKPerangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

1.2.Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Tahun 2020 Perangkat Daerah Kecamatan Larangan adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
 2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
 3. Landasan Operasional :
- 1) UU NO. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2) UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287)
 - 4). Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 - 5). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 - 6). Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.

- 7). Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
- 8). Undang – Undang Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
- 9). Undang – Undang Nomor : 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
- 10). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
- 11) . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734)
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014 ;

- 15) . Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
- 16) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517) ;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPerangkat Daerah) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 / E) ;
- 18) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 / E) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2006, tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah kabupaten Tahun 2006 Nomor 1 / E) ;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2021.
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015 ;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Larangan Tahun 2020, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPerangkat Daerah) Kabupaten Pamekasan .

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip **GOOD GOVERNANT** .

Tujuan :

penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Larangan tahun 2020 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun 2020 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Larangan .

Bab. I Pendahuluan .

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang :

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPerangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Propinsi / Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD ;

1.2. Landasan Hukum :

Memuat penjelasan tentang undang – undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan :

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan :

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun - tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja.

Jika Perangkat Daerah bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional /internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan.
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RK Perangkat Daerah.

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RK Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RK Perangkat Daerah, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RK Perangkat Daerah, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan , baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Bab. III Tujuan. Sasaran, Program dan Kegiatan.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Diskripsi untuk mengisi sub – sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional :

3.2. Telaahan Renstra.

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan .
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPerangkat Daerah, baik jenis program / kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan.

Bab. IV Penutup.

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan .
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah Kecamatan Larangan telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2018 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2020),bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2018 - 2023 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2018, dan realisasi renstra Perangkat Daerah Kecamatan Larangan yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan :

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kecamatan Larangan - Kabupaten Pamekasan

Kode				Uraian / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 (akhir tahun Renstra SKPerangkat Daerah)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2018	Target dan realisasi kinerja kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018			Target program / kegiatan	Perkiraan Realisasi program / kegiatan Renstra Perangkat Daerah s/d 2020		Catatan Sumber Dana
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	20	1		Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	APBD
1	20	1	2	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran yang di Akomodir	Administrasi kepegawaian, keuangan, surat-menyerurat, telpon, air, listrik, pendukung administrasi lainnya	Administrasi kepegawaian, keuangan, surat-menyerurat, telpon, air, listrik, pendukung administrasi lainnya	Administrasi kepegawaian, keuangan, surat-menyerurat, telpon, air, listrik, pendukung administrasi lainnya	Administrasi kepegawaian, keuangan, surat-menyerurat, telpon, air, listrik, pendukung administrasi lainnya	Administrasi kepegawaian, keuangan, surat-menyerurat, telpon, air, listrik, pendukung administrasi lainnya	Administrasi kepegawaian, keuangan, surat-menyerurat, telpon, air, listrik, pendukung administrasi lainnya	Administrasi kepegawaian, keuangan, surat-menyerurat, telpon, air, listrik, pendukung administrasi lainnya	100 %	APBD
1	20	2		Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	APBD
1	20	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100 %	APBD
1	20	2	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	2 Unit Mobil 7 Unit Sepeda motor	2 Unit Mobil 7 Unit Sepeda motor	2 Unit Mobil 7 Unit Sepeda motor	2 Unit Mobil 7 Unit Sepeda motor	2 Unit Mobil 7 Unit Sepeda motor	2 Unit Mobil 7 Unit Sepeda motor	2 Unit Mobil 7 Unit Sepeda motor	100 %	APBD
1	20	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	APBD
1	20	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100 %	APBD
1	20	2	42	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas Dalam Kondisi Baik	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	APBD
1	20	2	43	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang diadakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100 %	APBD
1	20	2		Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	APBD

				Sarana dan Prasarana Aparatur	Layak Fungsi									
1	20	3	2	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	14 Orang	14 Orang	14 Orang	14 Orang	14 Orang	14 Orang	14 Orang	100 %	APBD
1	20	6		Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	APBD
1	20	6	1	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen sapik yang disusun dengan kualitas baik	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	APBD
1	20	6	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPerangkat Daerah yang disusun	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100 %	APBD
1	20	16		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Presentase desa/ Kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik Presentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	APBD
1	20	16	1	Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Jumlah Musrenbang desa dan kecamatan yang diselenggarakan	13 Kali	13 Kali	13 Kali	13 Kali	13 Kali	13 Kali	13 Kali	100 %	APBD
1	20	16	1	Fasilitas pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang di fasilitasi	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	100 %	APBD
1	20	16	1	Fasilitas pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah organisasi perempuan dan PKK yang difasilitasi	38 kali	38 kali	38 kali	38 kali	38 kali	38 kali	38 kali	100 %	APBD
1	20	16	1	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme perangkat desa dan kelurahan	Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti pelatihan peningkatan dan profesionalisme	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100 %	APBD
1	20	16	1	Koordinasi dan Opraional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar keagamaan dan nasional yang di koordinasikan	2 item	2 item	2 item	2 item	2 item	2 item	2 item	100 %	APBD
1	20	16	1	Monitoring pengendalian keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilu	Jumlah pemilu yang di monitoring	2 item	2 item	2 item	2 item	2 item	2 item	2 item	100 %	APBD
1	20	16	1	Pembinaan Posyandu	Jumlah Posyandu yang Mendapat Pembinaan	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100 %	APBD
1	20	16	1	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Monitoring Pilikades Yang dilaksanakan	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	100 %	APBD

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Semua program dan kegiatan tahun 2018 telah terrealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100 %).

2. Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2018 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah.

No.	Sasaran Strategis /Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran (outcome)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018	
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	
				Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (Rp)	Keuangan (Rp)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Prosentase masyarakat yang puas dengan pelayanan kecamatan	%	100	289.822.000	99,78	289.822.000	99,78%	100%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	100	61.850.000	100	61.850.000	100%	100%
1.1.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran yang di Akomodir	Layanan	7	61.850.000	7	61.850.000	100%	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100	188.972.000	100	188.972.000	100%	100%
1.1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (PAK)	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	Unit	3	70.972.000	3	70.972.000	100%	100%
1.2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (PAK)	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Peralatan	9	60.000.000	9	60.000.000	100%	100%
1.3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	Kendaraan Dinas	1	45.500.000	1	45.500.000	100%	100%
1.4.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Gedung kantor	1	6.000.000	1	6.000.000	100%	100%
1.5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Peralatan	17	2.500.000	17	2.500.000	100%	100%
1.6.	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas Dalam Kondisi Baik	Rumah Dinas	1	4.000.000	1	4.000.000	100%	100%

C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100	10.000.000	100	10.000.000	100%	100%
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan formal	Aparatur	14	10.000.000	3	10.000.000	21%	100%
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	%	100	29.000.000	100	29.000.000	100%	100%
1	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen sakiap yang disusun dengan kualitas baik	Dokumen	6	14.000.000	6	14.000.000	100%	100%
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	100%	100%
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosentase desa yang sudah menyusun APBDesa dengan kualitas baik	%	100	56.000.000	100	56.000.000	100%	100%
		Prosentase Desa yang melaksanakan musrenbang dengan kualitas baik	%	100		100		100%	
F	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik	%	100	56.000.000	100	56.000.000	100%	100%
1	Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan (MUSREMBANG)	Jumlah Musrenbang desa dan kecamatan yang diselenggarakan	Musrenbang	13	20.000.000	13	20.000.000	100%	100%
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi	Desa	12	36.000.000	12	36.000.000	100%	100%
	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	prosentase rekomendasi hasil koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	%	100	144.880.000	100	144.880.000	100%	100%
E	Program Pengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	persentase sengketa masyarakat yang tertangani	%	100	26.880.000	100	26.880.000	100%	100%
1	Fasilitasi Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	Jumlah Pasar Yang Terfasilitasi	Lokasi	2	26.880.000	2	26.880.000	100%	100%
	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan	%	100	118.000.000	100	118.000.000	100%	100%

		dan kemasyarakatan yang dilaksanakan							
3	Fasilitasi Pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan dan PKK Yang Di Fasilitasi	PKK	12	18.000.000	12	18.000.000	100%	100%
4	Koordinasi dan Operasional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar keagamaan dan nasional yang di koordinasikan	Hari Besar	2	30.000.000	2	30.000.000	100%	100%
5	Monitoring Pengendalian Keamanan dan Ketertiban pelaksanaan Pemilu	Jumlah pemilu yang di monitoring	Pemilu	1	20.000.000	1	20.000.000	100%	100%
6	Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi/Konso lidasi/Silaturahmi Pimpinan Daerah bersama Ulama/Tokoh dan Masyarakat (PAK)	Jumlah Silaturahmi Pimpinan Daerah Bersama Ulama dan Masyarakat Yang Dilaksanakan	Silaturrah mi	1	50.000.000	1	50.000.000	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja (%)									
Indikator Sasaran								99,96%	100%
Indikator Program								100%	100%
Indikator Kegiatan								95%	100%
Peringkat Kinerja									
Sasaran								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kegiatan								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

1. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100 %
2. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan,
Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2018, faktor – faktor penyebabnya adalah kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing – masing Pejabat Struktural dan kurangnya SDM (Personil) di Kecamatan Larangan.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
-. Target capaian program Renstra tahun 2018 – 2021b elum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).
4. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah.
-. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf .

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Larangan tahun 2020, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi

merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Larangan merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Larangan.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan

Bidang	Uraian	Satuan	Tahun						Sumber Data
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kesejahteraan Sosial	Jumlah pasangan suami istri nikah massal (isbat)	Pasutri	6	5	5	15	19	14	Kesra
	Jumlah pasangan suami istri yang ber-akta nikah	Pasutri	334	329	182	285	286	277	KUA & TSKS
	Jumlah anak yatim/piatu	anak						113	KUA & TSKS
	Jumlah anak yatim/piatu yang mendapat santunan dari Pemerintah Daerah	anak						115	KUA & TSKS
	Jumlah keluarga pra sejahtera	keluarga	2966	3006					PLKB
	Jumlah keluarga sejahtera I	keluarga	2719	2713					PLKB
	Jumlah keluarga sejahtera II	keluarga	2276	2347					PLKB
	Jumlah peserta MTQ	peserta							
	Jumlah masyarakat miskin	orang						22795	Kesra
Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah penerima beras sejahtera (rastra)	keluarga	4348	4348	4348	3519	3519	3731	Kesra
	Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	pelanggaran	0	0	0	0	0	0	Trantib
	Jumlah kejadian tindak kriminal	kejadian			6	18	14	11	Trantib
	Jumlah linmas	linmas	48	48	48	48	48	48	Trantib
	Jumlah linmas aktif	linmas	48	48	48	48	48	48	Trantib
	Cakupan linmas aktif per desa	linmas/ desa	48	48	48	48	48	48	Trantib
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah posyandu	posyandu	47	47	47	47	47	47	PMD & Puskesmas
	Jumlah posyandu aktif	posyandu	47	47	47	47	47	47	PMD & Puskesmas
	Jumlah PKK Desa	PKK Desa	12	12	12	12	12	12	PMD
	Jumlah PKK Desa aktif	PKK Desa	12	12	12	12	12	12	PMD
	Jumlah karang taruna	karang taruna	12	12	12	12	12	12	PMD
	Jumlah karang taruna aktif	karang taruna	6	6	6	6	6	6	PMD
	Jumlah organisasi olah raga	organisasi	12	12	12	3	3	3	PMD
	Jumlah organisasi olah raga aktif	organisasi	12	12	8	3	3	3	PMD
	Jumlah organisasi kebudayaan	organisasi	4	4	4	4	4	4	PMD
	Jumlah organisasi kebudayaan aktif	organisasi	4	4	4	4	4	4	PMD
Pelayanan	Jumlah rekomendasi surat keterangan kelakuan baik / SKCK yang diterbitkan	rekomendasi			160	251	250	175	Pemerintahan
	Jumlah legalisir data kependudukan yang diterbitkan	legalisir							Pemerintahan
	Jumlah rekomendasi Model C yang diterbitkan	rekomendasi			2	1	3	2	Kepegawaian
	Jumlah rekomendasi surat pensiun yang diterbitkan	rekomendasi			4	2	1	4	Pemerintahan
	Jumlah surat keterangan pendaftaran pendidikan yang diterbitkan	surat keterangan			8	6	4	6	Pemerintahan

	Jumlah surat permohonan kredit perbankan yang diterbitkan	surat permohonan							Pemerintahan
	Jumlah rekomendasi pembuatan KTP - elektronik yang diterbitkan	rekomendasi pembuatan			207	182	10	240	Pemerintahan
	Jumlah rekomendasi pembuatan kartu keluarga / KK yang diterbitkan	rekomendasi			157	168	109		Pemerintahan
	Jumlah rekomendasi pembuatan akte kelahiran yang diterbitkan	rekomendasi pembuatan			140	132	67	35	Pemerintahan
	Jumlah surat keterangan pindah penduduk yang diterbitkan	surat keterangan			157	168	109	240	Pemerintahan
	Jumlah surat keterangan waris yang diterbitkan	surat keterangan			11	4	6	9	Pemerintahan
	Jumlah surat keterangan domisili yang diterbitkan	surat keterangan			17	19	14	24	Pemerintahan
	Jumlah surat keterangan kependudukan yang diterbitkan	surat keterangan			207	182	10		Pemerintahan
	Jumlah surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan	surat keterangan			11	45	104	386	Pemerintahan
	Jumlah rekomendasi nikah yang diterbitkan	rekomendasi			10	16	9	16	Kesra
	Jumlah rekomendasi proposal kegiatan sosial yang diterbitkan	rekomendasi proposal							Kesra
	Jumlah rekomendasi proposal kelompok masyarakat yang diterbitkan	rekomendasi proposal			14	12	10	54	PMD
	Jumlah rekomendasi proposal sarana prasarana yang diterbitkan	rekomendasi proposal							PMD
	Jumlah rekomendasi izin keramaian yang diterbitkan	rekomendasi			3	1	1	1	Trantib
	Jumlah rekomendasi SIUP yang diterbitkan	rekomendasi			2	6	1	4	Trantib
	Jumlah rekomendasi IMB yang diterbitkan	rekomendasi			3	11	6	4	Trantib
	Jumlah rekomendasi gangguan lingkungan / HO yang diterbitkan	rekomendasi							Trantib
	Jumlah rekomendasi usaha mikro yang diterbitkan	rekomendasi					567	27	Trantib
	Jumlah penanganan laporan pengaduan pelayanan publik yang diterbitkan	laporan	0	0	0	0	0	0	Pelayanan
	Jumlah SOP pelayanan	SOP			22	22	22	22	Pelayanan

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Larangan adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Larangan dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Larangan.
 - a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Larangan sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Larangan .
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Larangan hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Pamekasan.
 - d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Larangan sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Larangan terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Shof Weard – Hawaerd) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan ;
- b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan ;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;
- d. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;
- e. Perubahan KTP Siak menjadi e- KTP di Kecamatan Larangan saat ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e – KTP tidak bisa dioperasikan karena alat perekaman sidik jari dan iris mata sering trobel sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pamekasan dan diberi pengantar dari Kecamatan Pakong.

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya ;
- c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
- d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan ;

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Larangan terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

4. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

a. Urusan Perencanaan Pembangunan .

Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2020, telah dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan , dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa terealisasi.

b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

Kecamatan Larangan mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan – pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas , sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta harus pula memberikan perhatian lebih kepada para pemuda berprestasi.

c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Pada tahun anggaran 2018, SK Perangkat Daerah Kecamatan

Pakong, melalui Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan Larangan dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana prasaran yang mendukung.

d. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Kecamatan.

Pada tahun anggaran 2018, telah berhasil dilaksanakan oleh SK Perangkat Daerah Kecamatan Larangan melalui :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana prasarana yang mendukung.

e. **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .**

Pada tahun anggaran 2018, telah berhasil dilaksanakan oleh SKPerangkat Daerah Kecamatan Larangan melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RK Perangkat Daerah.

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2020.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RK PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 KECAMATAN LARANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	FUNGSI PENUNJANG								
3.08	PEMERINTAHAN UMUM								
3.08.13	Kecamatan Larangan				630,660,000				510,660,000
3.08.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik		• - 100%	68,000,000				68,000,000
3.08.13.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Kabupaten Pamekasan		0				0
3.08.13.01.19	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran yang di Akomodir	Kabupaten Pamekasan	4 jenis	68,000,000	APBD Kabupaten	Administrasi kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, telpon, air, listrik, pendukung administrasi lainnya	4 jenis	68,000,000
3.08.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi		• - 100%	126,860,000				126,860,000
3.08.13.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kabupaten Pamekasan	8 unit	80,000,000	APBD Kabupaten	Filing Cabinet, roll opact, Map Gantung, Odner, Bok Arsip, Lemari Arsip, Record, Record Center, Ruang Simpan Arsip Statis	8 unit	80,000,000
3.08.13.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik	Kabupaten Pamekasan	1 Unit	5,000,000	APBD Kabupaten	Gedung, Perlengkapan Tidur, Perlengkapan Dapur, Meja, Kursi	1 unit	5,000,000
3.08.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	Kabupaten Pamekasan	1 gedung	6,000,000	APBD Kabupaten	gedung, taman, perlengkapan kebersihan	1 gedung	6,000,000
3.08.13.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional dalam kondisi baik	Kabupaten Pamekasan	6 Item/ 2 roda 4 dan 4 roda 2	30,860,000	APBD Kabupaten	2 unit Roda 4, 4 Unit Roda 2	6 Item/ 2 roda 4 dan 4 roda 2	30,860,000

3.08.13.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan dalam kondisi baik	Kabupaten Pamekasan	5 jenis	5,000,000	APBD Kabupaten	3 Komputer PC, 3 Printer, 1 Laptop, 1 Sound System, 2 Microfon	5 jenis	5,000,000
3.08.13.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	• Prosentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai		• 100 %	6,800,000				6,800,000
3.08.13.03.08	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Jumlah Pakaian Dinas Harian yang diadakan	Kabupaten Pamekasan	17 Stel/Potong	6,800,000	APBD Kabupaten		17 Stel/Potong	6,800,000
3.08.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	• Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya		• - 100%	50,000,000				10,000,000
3.08.13.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Pamekasan	14 orang	50,000,000	APBD Kabupaten	5 Kasi, 2 Subbag, 7 Staf	14 orang	10,000,000
3.08.13.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	• Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik		• - 100%	55,000,000				55,000,000
3.08.13.06.05	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen saki yang disusun dengan kualitas baik	Kabupaten Pamekasan	2 Dokumen	30,000,000	APBD Kabupaten	RENJA, RENSTRA	6 Dokumen	30,000,000
3.08.13.06.06	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Kabupaten Pamekasan	4 dokumen	25,000,000	APBD Kabupaten	RKT Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja LAKIP	4 dokumen	25,000,000
3.08.13.51	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	• Prosentase desa/ kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik • Prosentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif		• 100 % • 100 %	264,000,000				184,000,000
3.08.13.51.01	Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Jumlah Musrenbang desa dan kecamatan yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	13 Kali	30,000,000	APBD Kabupaten	12 Musrenbang Desa, 1 Musrenbang Kecamatan	13 Kali	30,000,000
3.08.13.51.02	Fasilitas pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang di fasilitasi	Kabupaten Pamekasan	24 Kali	36,000,000	APBD Kabupaten	ADD, DD	24 Kali	36,000,000
3.08.13.51.03	Fasilitas pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah organisasi perempuan dan PKK	Kabupaten Pamekasan	38 kali	18,000,000	APBD Kabupaten		38 Kali	18,000,000
3.08.13.51.07	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme perangkat desa dan kelurahan	Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti pelatihan dan peningkatan profesionalisme	Kabupaten Pamekasan	12 Kali	30,000,000	APBD Kabupaten		12 Kali	30,000,000

3.08.13.51.08	Koordinasi dan Opraional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar keagamaan dan nasional yang di koordinasikan	Kabupaten Pamekasan	2 item	40,000,000	APBD Kabupaten	Safari Ramadhan, HUT Kemerdekaan RI	2 item	40,000,000
3.08.13.51.10	Monitoring pengendalian keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilu	Jumlah pemilu yang di monitoring	Kabupaten Pamekasan	2 item	20,000,000	APBD Kabupaten	Pemilihan DPR RI, DPR Provinsi, DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	0	0
3.08.13.51.56	Pembinaan Posyandu	Jumlah Posyandu yang Mendapat Pembinaan	Kabupaten Pamekasan	3 kali	30,000,000	APBD Kabupaten		3 kali	30,000,000
3.08.13.51.58	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Monitoring Pilkades Yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan	8 kali	60,000,000	APBD Kabupaten	Pilkades Sebanyak 8 Desa	0	0
3.08.13.58	Program Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	• Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani		• 100 %	60,000,000				60,000,000
3.08.13.58.01	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dengan baik	Kabupaten Pamekasan	6 pengaduan	20,000,000	APBD Kabupaten		6 pengaduan	20,000,000
3.08.13.58.02	Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	Jumlah fasilitas pasar yang terfasilitasi	Kabupaten Pamekasan	2 Lokasi	40,000,000	APBD Kabupaten		2 Lokasi	40,000,000

2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat(prosedur Baten Up).
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya .

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

- a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
- b. Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa / Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPerangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3. 1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPerangkat Daerah Kecamatan Larangan antara lain Program Nasional yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2020 oleh Kecamatan Larangan adalah :

Tabel 3.4
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Pamekasan

A. URUSAN WAJIB.

1. Perencanaan Pembangunan.

NO	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN / KOTA
1	ProgramPerencanaan Pembangunan	-	1
	Jumlah	-	1

2. Kepemudaan dan Olah Raga.

NO	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN / KOTA
1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	1	-
2	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	1	1

1	2	3	4
3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1	-
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1	-
5	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	1	-
	Jumlah	5	1

3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

NO	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN / KOTA
1	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	1	1
2	Program Pemeliharaan Kamtibmas	1	-
	Jumlah	2	1

4. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

NO	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN / KOTA
1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1	1
2	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	1	1
3	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah	1	1
4	Program Peningkatan Kerja sama antar Daerah	1	-
	Jumlah	4	3

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

NO	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN / KOTA
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1	1
2	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	1	1
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan	-	1
	Jumlah	2	3

3.2. Telaahan Renstra.

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-3 (Tiga) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

yaitu “PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK”

Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-3 ditetapkan

tujuan :

Mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien didukung aparatur yang profesional dan akuntabel, serta 1 (Satu) sasaran strategis. Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi

Kecamatan adalah

“ MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFESIEN

DIDUKUNG APARATUR YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL ”

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara

nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. tujuan dan sasaran Kecamatan Larangan tahun 2018-2023 adalah;

Tujuan:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan.
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
4. Meningkatkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa / Kelurahan se Kecamatan Larangan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2018.

Kode	Uraian	Anggaran				Realisasi				%
		Pegawai	Brg & Jasa	Modal	Jumlah	Pegawai	Brg & Jasa	Modal	Jumlah	
3.08.13.00.00	Kecamatan Larangan	82.350.000,00	277.380.000,00	130.972.000,00	490.702.000,00	82.350.000,00	274.048.350,00	112.954.500,00	469.352.850,00	95,65
3.08.13.01.00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.850.000,00	53.000.000,00	0,00	61.850.000,00	8.850.000,00	52.997.950,00	0,00	61.847.950,00	100,00
3.08.13.01.19	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.850.000,00	53.000.000,00	0,00	61.850.000,00	8.850.000,00	52.997.950,00	0,00	61.847.950,00	100,00
3.08.13.02.00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	58.000.000,00	130.972.000,00	188.972.000,00	0,00	56.025.900,00	112.954.500,00	168.980.400,00	89,42
3.08.13.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional (PAK)	0,00	0,00	70.972.000,00	70.972.000,00	0,00	0,00	53.454.500,00	53.454.500,00	75,32
3.08.13.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor (PAK)	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	59.500.000,00	59.500.000,00	99,17
3.08.13.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00	0,00	43.569.900,00	0,00	43.569.900,00	95,76
3.08.13.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.966.000,00	0,00	5.966.000,00	99,43
3.08.13.02.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
3.08.13.02.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.990.000,00	0,00	3.990.000,00	99,75
3.08.13.05.00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
3.08.13.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
3.08.13.06.00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.950.000,00	15.050.000,00	0,00	29.000.000,00	13.950.000,00	15.050.000,00	0,00	29.000.000,00	100,00
3.08.13.06.05	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	10.500.000,00	3.500.000,00	0,00	14.000.000,00	10.500.000,00	3.500.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
3.08.13.06.06	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.450.000,00	11.550.000,00	0,00	15.000.000,00	3.450.000,00	11.550.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
3.08.13.24.00	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	8.100.000,00	18.780.000,00	0,00	26.880.000,00	8.100.000,00	18.680.000,00	0,00	26.780.000,00	99,63
3.08.13.24.02	Fasilitasi Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	8.100.000,00	18.780.000,00	0,00	26.880.000,00	8.100.000,00	18.680.000,00	0,00	26.780.000,00	99,63
3.08.13.51.00	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	51.450.000,00	122.550.000,00	0,00	174.000.000,00	51.450.000,00	121.294.500,00	0,00	172.744.500,00	99,28

3.08.13.51.01	Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)	2.350.000,00	17.650.000,00	0,00	20.000.000,00	2.350.000,00	17.650.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
3.08.13.51.02	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	10.500.000,00	25.500.000,00	0,00	36.000.000,00	10.500.000,00	25.420.000,00	0,00	35.920.000,00	99,78
3.08.13.51.03	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan Dan Kesejahteraan Keluarga	13.500.000,00	4.500.000,00	0,00	18.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
3.08.13.51.08	Koordinasi Dan Operasional Peringatan Hari Besar Keagamaan Dan Hari Besar Nasional	4.050.000,00	25.950.000,00	0,00	30.000.000,00	4.050.000,00	25.949.500,00	0,00	29.999.500,00	100,00
3.08.13.51.46	Monitoring Pengendalian Keamanan Dan Ketertiban Pelaksanaan Pemilu	15.300.000,00	4.700.000,00	0,00	20.000.000,00	15.300.000,00	3.525.000,00	0,00	18.825.000,00	94,13
3.08.13.51.82	Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi/Konsolidasi/Silatura hmi Pimpinan Daerah bersama Ulama/Tokoh dan Masyarakat (PAK)	5.750.000,00	44.250.000,00	0,00	50.000.000,00	5.750.000,00	44.250.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00

c

C. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPerangkat Daerah, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPerangkat Daerah, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

D. Tabel rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 Kecamatan Larangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	FUNGSI PENUNJANG								
3.03	PEMERINTAHAN UMUM								
3.03.13	Kecamatan Larangan				585.000.000				543.000.000
3.03.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik		• 90 %	102.000.000				78.000.000
3.03.13.01.01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat-rapat ke luar daerah	Kabupaten Pamekasan	10 Orang/12 Bulan	10.000.000	APBD Kabupaten		10 Orang/12 Bulan	10.000.000
3.03.13.01.02	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang di Akomodir	Kabupaten Pamekasan	6 Item	92.000.000	APBD Kabupaten		6 Item	68.000.000
3.03.13.02	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	• Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya		• 95 % • 95 %	250.000.000				197.000.000
3.03.13.02.01	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor Dalam Kondisi Baik	Kabupaten Pamekasan	1 Unit	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit	15.000.000

3.03.13.02.02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Dalam Kondisi Baik	Kabupaten Pamekasan	6 Item/2 Roda 4 dan 4 Roda 2	20.000.000	APBD Kabupaten		6 Item/2 Roda 4 dan 4 Roda 2	20.000.000
3.03.13.02.04	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Kabupaten Pamekasan	5 Jenis	10.000.000	APBD Kabupaten		5 Jenis	15.000.000
3.03.13.02.05	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Yang Diadakan	Kabupaten Pamekasan	8 Unit	15.000.000	APBD Kabupaten		8 Unit	30.000.000
3.03.13.02.07	Pengadaan meubeleu	Jumlah Meubeleu Yang Diadakan	Kabupaten Pamekasan	50 Buah	0	APBD Kabupaten		50 Buah	20.000.000
3.03.13.02.08	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diadakan	Kabupaten Pamekasan	3 Unit	60.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit	20.000.000
3.03.13.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat rumah Dinas Gedung Kantor	Jumlah Rumah Dinas Gedung Kantor yang direhabilitasi	Kabupaten Pamekasan	1 Unit	70.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit	50.000.000
3.03.13.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Rumah Dinas dalam kondisi baik	Kabupaten Pamekasan	1 Unit	20.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit	7.000.000
3.03.13.02.22	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kabupaten Pamekasan	14 Orang/12 Bulan	40.000.000	APBD Kabupaten		14 Orang/12 Bulan	20.000.000
3.03.13.03	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	• • Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik		• 95 %	35.000.000				35.000.000
3.03.13.03.01	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kegiatan Kinerja Yang Dihasilkan	Kabupaten Pamekasan	2 Dokumen	20.000.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen	20.000.000
3.03.13.03.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Dengan Kualitas Baik	Kabupaten Pamekasan	4 Dokumen	15.000.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen	15.000.000
3.03.13.08	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	• Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik		• 95 %	198.000.000				213.000.000

		• Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif • Persentase sengketa masyarakat yang tertangani		• 95 % • 95 %					
3.03.13.08.01	Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Prosentase Desa / Kelurahan Yang Melaksanakan Musrenbang Dengan Baik	Kabupaten Pamekasan	13 Kali	30.000.000	APBD Kabupaten		13 Kali	20.000.000
3.03.13.08.02	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	Kabupaten Pamekasan	24 Kali	30.000.000	APBD Kabupaten		24 Kali	30.000.000
3.03.13.08.03	Fasilitas pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Organisasi Perempuan Dan PKK yang difasilitasi	Kabupaten Pamekasan	38 Kali	18.000.000	APBD Kabupaten		38 Kali	18.000.000
3.03.13.08.05	Fasilitasi kepemudaan dan olahraga	Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga yang terfasilitasi	Kabupaten Pamekasan	2 Kali	35.000.000	APBD Kabupaten		2 Kali	15.000.000
3.03.13.08.07	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Pelatihan Peningkatan dan Profesionalisme	Kabupaten Pamekasan	12 Kali	0	APBD Kabupaten		12 Kali	15.000.000
3.03.13.08.08	Koordinasi dan Operasional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Jumlah Hari Besar Keagamaan Dan Hari Besar Nasional Yang Dikoordinasikan	Kabupaten Pamekasan	2 Item	45.000.000	APBD Kabupaten		2 Item	30.000.000
3.03.13.08.47	Optimalisasi Pemungutan PBB	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Terfasilitasi	Kabupaten Pamekasan	12 Desa	0	APBD Kabupaten		12 Desa	15.000.000
3.03.13.08.48	Pembinaan Posyandu	Jumlah Posyandu Yang terfasilitasi	Kabupaten Pamekasan	3 Kali	0	APBD Kabupaten		3 Kali	20.000.000
3.03.13.08.60	Penanganan Sengketa Masyarakat	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dengan baik	Kabupaten Pamekasan	6 pengaduan	0	APBD Kabupaten		6 pengaduan	10.000.000
3.03.13.08.61	Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	Jumlah Pasar Yang Terfasilitasi	Kabupaten Pamekasan	2 Lokasi	30.000.000	APBD Kabupaten		2 Lokasi	10.000.000

3.03.13.08.88	Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi/Konsolidasi/Silaturahmi Pimpinan Daerah bersama Ulama/Tokoh dan Masyarakat	Jumlah Silaturahmi Pimpinan Daerah Bersama Ulama dan Masyarakat yang di laksanakan	Kabupaten Pamekasan	1 Kali	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Kali	30.000.000
3.03.13.09	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	• Persentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP		• 95 %	0				20.000.000
3.03.13.09.01	Pengembangan dan Operasionalisasi Aplikasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Aplikasi Pelayanan Terpadu Yang Dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	2 Aplikasi	0	APBD Kabupaten		2 Aplikasi	10.000.000
3.03.13.09.02	Survey kepuasan masyarakat	Jumlah Survey Yang Dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan	2 Kali	0	APBD Kabupaten		2 Kali	10.000.000

BAB. IV

PENUTUP

a. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan Larangan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Larangan merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .

- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Larangan dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.
- c. Rencana tindaklanjut Perangkat Daerah Kecamatan Larangan pada tahun 2020 mendatang akan menetapkan 5 program, 26 kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2020.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Larangan tahun 2020 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pakong tahun 2020 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Larangan tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Larangan, 30 Januari 2020

CAMAT LARANGAN

ACHMAD HAMBALI, S.Sos

Pembina

Nip. 1963

METRIK USULAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 KECAMATAN LARANGAN – KABUPATEN PAMEKASAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Seksi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target RPJMD										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tujuan 1																				
1	Meningkatkan aktifitas layanan administrasi dan operasional perangkat daerah				Indeks Kepuasan Unit Kerja	95%	95%	175.320.000	95%	177.450.000	95%	185.250.000	95%	209.000.000	95%	229.400.000	100%	229.400.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
		Pelaksanaan fungsi operasional dan administrasi perangkat daerah yang efektif dan efisien			Prosentase Kegiatan yang sesuai SOP	90%	90%	175.320.000	90%	177.450.000	90%	185.250.000	90%	209.000.000	95%	229.400.000	100%	229.400.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
		3.08.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		• Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	90%	90%	34.440.000	90%	35.700.000	90%	37.050.000	90%	39.900.000	90%	42.550.000	100%	42.550.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
		3.08.13.01.01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretaris Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat-rapat ke luar daerah	90%	10 Orang/ 12 Bulan	10.000.000	10 Orang/ 12 Bulan	10.000.000	10 Orang/ 12 Bulan	10.000.000	10 Orang/1 2 Bulan	10.000.000	10 Orang/12 Bulan	10.000.000	10 Orang/ 12 Bulan	10.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
		3.08.13.01.02	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretaris Camat	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang di Akomodir	95%	6 Item	24.440.000	6 Item	25.700.000	6 Item	27.050.000	6 Item	29.900.000	6 Item	32.550.000	6 Item	32.550.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan

			3.08.13.02	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Aparatur Kinerja		• Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	95%														
							95%	95%	119.280.000	95%	122.850.000	95%	130.650.000	95%	148.200.000	95%	164.650.000	100%	164.650.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.02.01	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekretaris Camat	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	95%	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.02.02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	Sekretaris Camat	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Dalam Kondisi Baik	95%	6 Item/2 Roda 4 dan 4 Roda 2	20.000.000	6 Item/2 Roda 4 dan 4 Roda 2	20.850.000	6 Item/2 Roda 4 dan 4 Roda 2	20.650.000	6 Item/2 Roda 4 dan 4 Roda 2	20.200.000	6 Item/2 Roda 4 dan 4 Roda 2	25.000.000	6 Item/2 Roda 4 dan 4 Roda 2	25.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.02.04	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sekretaris Camat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	95%	5 Jenis	5.000.000	5 Jenis	5.000.000	5 Jenis	5.000.000	5 Jenis	5.000.000	5 Jenis	9.650.000	5 Jenis	9.650.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.02.05	Pengadaan peralatan gedung kantor	Sekretaris Camat	Jumlah Peralatan Gedung Yang Diadakan	95%	8 Unit	20.280.000	8 Unit	20.000.000	8 Unit	28.000.000	8 Unit	33.000.000	8 Unit	33.000.000	8 Unit	33.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.02.07	Pengadaan mebeleur	Sekretaris Camat	Jumlah Peralatan Mebeleur Yang Diadakan	95%	4 Item	10.000.000	4 Item	10.000.000	4 Item	10.000.000	4 Item	10.000.000	4 Item	10.000.000	4 Item	10.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.02.14	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Rumah Dinas dalam kondisi baik	95%	1 Unit	5.000.000	1 Unit	7.000.000	1 Unit	7.000.000	1 Unit	7.000.000	1 Unit	7.000.000	1 Unit	7.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat rumah Dinas Gedung Kantor	Kasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Rumah Dinas Gedung yang direhabilitasi	95%	1 Unit	34.000.000	1 Unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000	1 Unit	48.000.000	1 Unit	55.000.000	1 Unit	55.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.02.22	Pendidikan dan pelatihan formal	Sekretaris Camat	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	95%	14 Orang/ 12 Bulan	10.000.000	14 Orang/ 12 Bulan	10.000.000	14 Orang/ 12 Bulan	10.000.000	14 Orang/12 Bulan	10.000.000	14 Orang/12 Bulan	10.000.000	14 Orang/ 12 Bulan	10.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.03	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan.		• Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	95%	95%	21.600.000	95%	18.900.000	95%	17.550.000	95%	20.900.000	95%	22.200.000	100%	22.200.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.03.01	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Sekretaris Camat	Jumlah Laporan Kegiatan Kinerja Yang Dihasilkan	95%	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	8.000.000	2 Dokumen	7.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan

			3.08.13.03.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretaris Camat	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Dengan Kualitas Baik	95%	4 Dokumen	11.600.000	4 Dokumen	10.900.000	4 Dokumen	10.550.000	4 Dokumen	10.900.000	4 Dokumen	12.200.000	4 Dokumen	12.200.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Kecamatan					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95%	95%	193.920.000	95%	163.380.000	95%	153.660.000	95%	152.380.000	95%	183.150.000	100%	183.150.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
		Pelayanan Masyarakat dan Tata Pemerintahan yang Berkualitas				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95%	95%	193.920.000	95%	163.380.000	95%	153.660.000	95%	152.380.000	95%	183.150.000	100%	183.150.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.08	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum		- Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik - Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif - persentase sengketa masyarakat yang tertangani	95%	95%	184.320.000	95%	148.680.000	95%	138.060.000	95%	133.380.000	95%	164.650.000	100%	164.650.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.08.01	Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Desa / Kelurahan Yang Melaksanakan Musrenbang Dengan Baik	95%	13 Kali	18.000.000	13 Kali	15.000.000	13 Kali	15.000.000	13 Kali	15.000.000	13 Kali	18.000.000	13 Kali	18.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.08.02	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kasi Tata Pemerintahan	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	95%	24 Kali	21.320.000	24 Kali	20.000.000	24 Kali	20.000.000	24 Kali	20.000.000	24 Kali	21.650.000	24 Kali	21.650.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.08.03	Fasilitas pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Organisasi Perempuan Dan PKK	95%	38 Kali	15.000.000	38 Kali	15.000.000	38 Kali	15.000.000	38 Kali	15.000.000	38 Kali	15.000.000	38 Kali	15.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.08.04	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Kasi Tata Pemerintahan	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Pelatihan Peningkatan dan Profesionalisme	95%	12 Kali	10.000.000	12 Kali	10.000.000	12 Kali	10.000.000	12 Kali	10.000.000	12 Kali	10.000.000	12 Kali	10.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan

			3.08.13.08.05	Facilitasi Kepemudaan dan Olahraga	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga yang terfasilitasi	95%	2 Kali	10.000.000	2 Kali	10.000.000	2 Kali	10.000.000	2 Kali	10.000.000	2 Kali	10.000.000	2 Kali	10.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.08.08	Koordinasi dan Operasional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Kasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Hari Besar Keagamaan Dan Hari Besar Nasional Yang Dikoordinasikan	95%	2 Item	25.000.000	2 Item	23.680.000	2 Item	23.060.000	2 Item	20.380.000	2 Item	20.000.000	2 Item	20.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.08.10	Monitoring pengendalian keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilu	Kasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pemilu Yang Dimonitoring	95%	2 Item	10.000.000	2 Item	-	2 Item	-	2 Item	-	2 Item	10.000.000	2 Item	10.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.08.47	Optimalisasi Pemungutan PBB	Kasi Tata Pemerintahan	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Terfasilitasi	95%	12 Desa	10.000.000	12 Desa	10.000.000	12 Desa	10.000.000	12 Desa	10.000.000	12 Desa	10.000.000	12 Desa	10.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.08.48	Pembinaan Posyandu	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Posyandu Yang terfasilitasi	95%	3 Kali	15.000.000	3 Kali	15.000.000	3 Kali	10.000.000	3 Kali	10.000.000	3 Kali	15.000.000	3 Kali	15.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.08.50	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kasi Tata Pemerintahan	Jumlah Pilkades Yang Dimonotoring	95%	8 Kali	8.000.000	8 Kali	-	4 Kali	-	4 Kali	-	8 Kali	8.000.000	8 Kali	8.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.08.51	Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi/Konsolidasi /Silaturahmi Pimpinan Daerah bersama Ulama/Tokoh dan Masyarakat	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Silaturahmi Pimpinan Daerah Bersama Ulama dan Masyarakat yang di laksanakan	95%	1 Kali	20.000.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	13.000.000	1 Kali	10.000.000	1 Kali	10.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.08.60	Penanganan Sengketa Masyarakat	Kasi Ketentrangan dan Ketertiban	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dengan baik	95%	6 pengaduan	10.000.000	6 pengaduan	5.000.000	6 pengaduan	5.000.000	6 pengaduan	5.000.000	6 pengaduan	5.000.000	6 pengaduan	5.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.08.61	Facilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	Kasi Ketentrangan dan Ketertiban	Jumlah Pasar Yang Terfasilitasi	95%	2 Lokasi	12.000.000	2 Lokasi	10.000.000	2 Lokasi	5.000.000	2 Lokasi	5.000.000	2 Lokasi	12.000.000	2 Lokasi	12.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.09	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan		• Persentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP	95%	95%	9.600.000	95%	14.700.000	95%	15.600.000	95%	19.000.000	95%	18.500.000	100%	18.500.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.09.01	Pengembangan dan Operasionalisasi Aplikasi Pelayanan Masyarakat	Kasi Pelayanan	Jumlah Aplikasi Pelayanan Terpadu Yang Dikembangkan	90%	2 Aplikasi	2.500.000	2 Aplikasi	4.000.000	2 Aplikasi	5.000.000	2 Aplikasi	5.000.000	2 Aplikasi	5.000.000	2 Aplikasi	5.000.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan
			3.08.13.09.02	Survey kepuasan masyarakat	Kasi Pelayanan	Jumlah Survey Yang Dilaksanakan	95%	2 Kali	7.100.000	2 Kali	10.700.000	2 Kali	10.600.000	2 Kali	14.000.000	2 Kali	13.500.000	2 Kali	13.500.000	Kantor Kecamatan Larangan	Kantor Kecamatan Larangan